# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Tahun, 2010.

Astawa, I Gde Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumn, Tahun, 2018.

Binsar M. Gultom, 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

BPJS Kesehatan*, Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang*, Jakarta: BPJS Kesehatan, Tahun, 2017.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Tahun, 2003.

Erliyana, Anna. *Keputusan Presiden : Analisis Keppres R.I. 1987—1998, Program Pascarsarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, Tahun, 2005

Farid Pardamean Putra Irawan, *Kontroversi Perpres Nomor 64 tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Di Tengah Pandemi Covid-19,* Kontroversi Perpres

Hoessein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Tahun, 2009

Huda, Ni’matul, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, Tahun, 2011.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, Tahun, 2014.

Irwan,Achmad Hamzani.Soesi Idayanti,Tiyas Vika Widiastuti, *Panduan penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,* Tegal: Sekertariat Fakultas Hukum, Tahun, 2023.

Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.* Jakarta: Kemenkes, Tahun, 2018.

Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, Tahun, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group, Tahun, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun, 2011.

Murtika, I Ketut, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara,Tahun, 2017.

Panggabean, Henry Pandapotan. Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003. Liberty, Yogjakarta, 2005

Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rienika Cipta, Tahun, 2014.

Setiyono, Budi, *Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Tahun, 2018.

Soemantri, Sri, *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. Bandung: Remadja Karya, Tahun 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta, Tahun, 2007.

Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*.Yogyakarta: Thafamedia, Tahun, 2017.

Sulastomo, *Sistem jaminan Sosial Nasional* , Jakarta Rajawali Pers, Tahun 2008.

Zulkarnain, Sirajuddin, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Malang: Setara Press, Tahun 2016.

**Jurnal-Jurnal**

Andalas, P. S. K. F. Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6 Tahun 2010

AUDY, M. A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7p/Hum/2020 Tentang Pembatalan Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan, Jurnal Ilmiah fakultas hukum Universitas Mataram. 2021.

Ayu Larasati, N. I. K. E. N. Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Tarif Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Studi Bentuk Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi) Doctoral dissertation, Universitas Krisnadwipayana, hlm 64-87, Tahun 2022.

Desi Hanggono Rarasati, *Dampak Kenaikan Tarif Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang,* Jurnal Politik Muda, Volume 6, Nomor 1, Maret 2017.

Desi Hanggono Rarasati, Dampak Kenaikan Tarif Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang, *Jurnal Politik Muda, Vol.6, No.1, Januari – Maret 2017*

Fathorrahman, F. Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Volume1, Nomor 2 Tahun 2021.

Juliansyah, M. F. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/Hum/2020 Terhadap Legalitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Tahun, 2020.

Nadhif, A. Perlindungan Hukum Pasien Bpjs Kesehatan Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Volume 1. Nomor 1 Tahun 2023.

Nuryasin, A. P. PENERAPAN ASAS PRADUGA RECHMATIG PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 2 Tahun 2022

Rachmaniah, A. *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) TERHADAP TATA KELOLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 7 P/HUM/2020*, Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Tahun 2023.

Satria, D. F., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Kepastian Hukum terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. *Indonesia Law Reform Journal*, Volume 1, Nomor 2 ,Tahun 2021,hlm. 153-164.

Simanjuntak, E. *Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume *2*, Nomor 3, Tahun, 2018, hlm. 332-346

**Website**

Fitratun Komariah, Data 2023, 95 Persen Masyarakat Terdaftar BPJS Kesehatan, dalam link <https://www.rri.co.id/kesehatan/512666/data-2023-95-persen-masyarakat-terdaftar-bpjs-kesehatan>.

Ardiansyah Fadli, 2021, “BPJS Kesehatan”, https://www.kompas.com/BPJS /read/2021/02/05/131151621/bpjs-kesehatan?page=all.

Aida Mardatillah, Alasan KPCDI Kembali “Gugat” Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, dalam link <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-kpcdi-kembali-gugat-perpres-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-lt5ece376047220/>,

Fitratun Komariah, Data 2023, 95 Persen Masyarakat Terdaftar BPJS Kesehatan, dalam link <https://www.rri.co.id/kesehatan/512666/data-2023-95-persen-masyarakat-terdaftar-bpjs-kesehatan>.

Audy, M. A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7p/Hum/2020 Tentang Pembatalan Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan, Diakses dari [Muhammad-Alan-Audy-D1A116184.pdf (unram.ac.id)](https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/Muhammad-Alan-Audy-D1A116184.pdf).

**Undang-Undang**

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Peraruran Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan